

ABSTRAK

Adelia Permatasari: Analisis Perlakuan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 Pada Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LWP PBNU)

Wakaf di Indonesia telah berkembang signifikan, baik sebagai instrument ekonomi syariah maupun dalam menciptakan kesejahteraan sosial, terutama mengingat potensi besar yang dimiliki negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama tahun 2023 mencatat luas tanah wakaf mencapai 57.263,69 hektare dengan 57,42% telah bersertifikat, sementara Indonesia juga diakui sebagai negara paling dermawan oleh *The Worlds Giving Index* 2022. Meski demikian, penerapan PSAK 112, standar Akuntansi Wakaf, masih belum sepenuhnya diimplementasikan oleh Lembaga-lembaga wakaf, termasuk Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LWP PBNU).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan kesesuaian perlakuan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 di Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LWP PBNU), guna menilai efektivitasnya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perlakuan akuntansi wakaf di Lembaga Wakaf Indonesia.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori akuntansi, laporan keuangan, wakaf, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 112).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan pencarian literatur terkait. Sedangkan Teknik data yang dilakukan dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu: menemukan bahwa pada Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LWP PBNU), pengakuan awal aset wakaf dilakukan ketika wakif telah melakukan ikrar wakaf dan nazhir memiliki kendali penuh atas aset tersebut, dengan pengukuran aset berdasarkan nilai nominal dan nilai wajar. Namun, penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan standar PSAK 112, Implementasi PSAK 112 di LWP PBNU belum sepenuhnya diterapkan, terutama dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf. Beberapa kriteria dalam PSAK 112, seperti pemisahan aset wakaf temporer ke dalam akun yang berbeda dan penyajian laporan aset kelolaan yang sesuai, masih belum maksimal. Selain itu, laporan keuangan tidak menyertakan catatan yang diperlukan sesuai PSAK 112, menunjukkan perlunya peningkatan dalam penerapan standar ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset wakaf.

Kata Kunci: *Wakaf, PSAK 112, LWP PBNU, Akuntansi Wakaf, Pengelolaan Wakaf*